



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA**

Jalan Desa Pandansari Nomor 32 Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16720

Telepon/Faksimile (0251) 8246800

Laman: [www.pusbangasn.bkn.go.id](http://www.pusbangasn.bkn.go.id);| Pos-el: [pusbang@bkn.go.id](mailto:pusbang@bkn.go.id)

---

Nomor : 431/Pnwr.A/TU/Pusbangpeg ASN/VII/2023

7 Juli 2023

Lampiran : 3 (tiga) dokumen

Perihal : **Penawaran Beasiswa**

**Pendidikan Ilmu Kepegawaian Angkatan XVII**

Yang terhormat,

Bapak/Ibu (daftar terlampir)

di tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA), Pendidikan Ilmu Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (PIK BKN) bekerja sama dengan Universitas Terbuka membuka penerimaan mahasiswa baru Strata 1 (S1) PIK BKN Angkatan XVII, Program Studi Administrasi Publik bidang minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian.

Mahasiswa PIK BKN akan dibekali dengan pengetahuan teoritis dan praktik dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi di bidang pengelolaan SDM Aparatur. Persyaratan bagi calon penerima beasiswa ini adalah sebagai berikut:

1. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan/atau Pejabat yang Berwenang (PyB) minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) masing-masing Instansi yang dibuktikan dengan Surat Persetujuan PPK dan/atau PyB (format terlampir);
2. Surat Pernyataan Kesiediaan dari Pimpinan Unit Kerja untuk menempatkan alumni PIK BKN pada bidang pengelola kepegawaian (format terlampir);
3. Mengikuti dan lulus seleksi berbasis komputer dan wawancara oleh panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru PIK BKN;

4. Memiliki masa kerja paling singkat 1 tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
5. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
6. Usia maksimal **40 tahun** pada tanggal 31 Desember 2023;
7. Membuat surat pernyataan calon mahasiswa (format terlampir) bersedia mengikuti tugas belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sanggup mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan BKN apabila:
  - a. mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi;
  - b. mengundurkan diri selama masa perkuliahan;
  - c. tidak dapat menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan waktu yang ditentukan; atau
  - d. tidak memenuhi standar kelulusan akademis dalam evaluasi per semester yang dilakukan oleh PIK BKN.

Komponen biaya yang ditanggung oleh BKN antara lain:

1. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang meliputi: biaya pendaftaran kuliah, SPP, uang kuliah, biaya ujian, seragam dan atribut mahasiswa selama 4 (empat) tahun; dan
2. Biaya Praktik Kerja Kepegawaian.

Komponen biaya yang ditanggung oleh instansi pengirim antara lain:

1. Biaya perjalanan dinas dan transportasi;
2. Biaya hidup selama mengikuti pendidikan;
3. Buku Penunjang Pendidikan;
4. Biaya wisuda; dan
5. Biaya lainnya, sebagai penunjang pendidikan mahasiswa.

Instansi pemerintah yang berminat dengan penawaran ini, kami persilakan untuk melakukan pendaftaran secara kolektif dan/atau mandiri dengan mengirimkan data dan dokumen PNS yang bersangkutan melalui tautan <https://pusbangasn.bkn.go.id/reg-pik> selambatnya tanggal 16 September 2023. Adapun dokumen yang diunggah (ukuran setiap dokumen maksimal 1 MB) adalah sebagai berikut:

1. Pas Foto berlatar belakang merah ukuran 3x4;
2. Ijazah Pendidikan Terakhir;

3. Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
4. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
7. Surat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang Berwenang minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
8. Surat Pernyataan Kesiapan Pimpinan Unit Kerja; dan
9. Surat Pernyataan Calon Mahasiswa.

Ujian seleksi dan kegiatan perkuliahan berlangsung di Kampus PIK BKN, Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara, Jalan Desa Pandansari Nomor 32 Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (jadwal terlampir). Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat PIK BKN narahubung: Rama Duluber (0822 8014 9945)/ Agung Prasetya (0821 3574 9943).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN

~

Tembusan:

1. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, (sebagai laporan);
2. Sekretaris Utama BKN;
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama BKN;
4. Inspektur BKN; dan
5. Kepala Kantor Regional BKN I – XIV.

Lampiran I Surat Kepala Pusbangpeg ASN BKN  
Nomor : 431/Pnwr.A/TU/Pusbangpeg ASN/VII/2023  
Tanggal : 7 Juli 2023

### DAFTAR TUJUAN SURAT

NO	NAMA INSTANSI
<b>WILAYAH KERJA BKN PUSAT</b>	
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
5	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
7	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
8	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
10	Kementerian Pemuda Olahraga
11	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
12	Kementerian Dalam Negeri
13	Kementerian Luar Negeri
14	Kementerian Pertahanan
15	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
16	Kementerian Keuangan
17	Kementerian Pertanian
18	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
19	Kementerian Perhubungan
20	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
21	Kementerian Kesehatan
22	Kementerian Agama
23	Kementerian Ketenagakerjaan
24	Kementerian Sosial
25	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
26	Kementerian Kelautan dan Perikanan
27	Kementerian Komunikasi dan Informatika
28	Kementerian Perdagangan
29	Kementerian Perindustrian
30	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
31	Kementerian Pariwisata
32	Kementerian Sekretariat Negara

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BSre



NO	NAMA INSTANSI
33	Kejaksaan Agung
34	Badan Intelijen Negara
35	Sekretariat Jenderal MPR
36	Sekretariat Jenderal DPR RI
37	Mahkamah Agung RI
38	Badan Pemeriksa Keuangan
39	Setjen WANTANNAS
40	Lembaga Sandi Negara
41	Badan Kepegawaian Negara
42	Lembaga Administrasi Negara
43	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
44	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
45	Badan Tenaga Nuklir Nasional
46	Badan Pusat Statistik
47	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
48	Arsip Nasional Republik Indonesia
49	Badan Informasi Geospasial
50	Badan Kependudukan dan KB Nasional
51	Badan Koordinasi Penanaman Modal
52	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
53	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
54	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
55	Perpustakaan Nasional RI
56	Badan Standardisasi Nasional
57	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
58	Badan Pengawas Obat dan Makanan
59	Lembaga Ketahanan Nasional RI
60	Kepolisian Negara
61	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
62	Sekretariat Kabinet
63	Badan Narkotika Nasional
64	Setjen Komisi Pemilihan Umum
65	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
66	Setjen KOMNAS HAM
67	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
68	Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi
69	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
70	Setjen Dewan Perwakilan Daerah
71	Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI

<b>NO</b>	<b>NAMA INSTANSI</b>
72	Badan Keamanan Laut RI
73	Badan SAR Nasional
74	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
75	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
76	Ombudsman Republik Indonesia
77	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
79	Setjen Komisi Pengawas Persaingan Usaha
80	Badan Pengawas Pemilihan Umum
<b>WILAYAH KERJA KANREG I BKN YOGYAKARTA</b>	
1	Pemerintah Daerah D I Yogyakarta
2	Pemerintah Kab. Bantul
3	Pemerintah Kab. Sleman
4	Pemerintah Kab. Gunung Kidul
5	Pemerintah Kab. Kulon Progo
6	Pemerintah Kota Yogyakarta
7	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
8	Pemerintah Kab. Semarang
9	Pemerintah Kab. Kendal
10	Pemerintah Kab. Demak
11	Pemerintah Kab. Grobogan
12	Pemerintah Kab. Pekalongan
13	Pemerintah Kab. Batang
14	Pemerintah Kab. Tegal
15	Pemerintah Kab. Brebes
16	Pemerintah Kab. Pati
17	Pemerintah Kab. Kudus
18	Pemerintah Kab. Pemalang
19	Pemerintah Kab. Jepara
20	Pemerintah Kab. Rembang
21	Pemerintah Kab. Blora
22	Pemerintah Kab. Banyumas
23	Pemerintah Kab. Cilacap
24	Pemerintah Kab. Purbalingga
25	Pemerintah Kab. Banjarnegara
26	Pemerintah Kab. Magelang
27	Pemerintah Kab. Temanggung
28	Pemerintah Kab. Wonosobo
29	Pemerintah Kab. Purworejo

<b>NO</b>	<b>NAMA INSTANSI</b>
30	Pemerintah Kab. Kebumen
31	Pemerintah Kab. Klaten
32	Pemerintah Kab. Boyolali
33	Pemerintah Kab. Sragen
34	Pemerintah Kab. Sukoharjo
35	Pemerintah Kab. Karanganyar
36	Pemerintah Kab. Wonogiri
37	Pemerintah Kota Semarang
38	Pemerintah Kota Salatiga
39	Pemerintah Kota Pekalongan
40	Pemerintah Kota Tegal
41	Pemerintah Kota Magelang
42	Pemerintah Kota Surakarta
<b>WILAYAH KERJA KANREG II BKN SURABAYA</b>	
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2	Pemerintah Kab. Gresik
3	Pemerintah Kab. Mojokerto
4	Pemerintah Kab. Sidoarjo
5	Pemerintah Kab. Jombang
6	Pemerintah Kab. Sampang
7	Pemerintah Kab. Pamekasan
8	Pemerintah Kab. Sumenep
9	Pemerintah Kab. Bangkalan
10	Pemerintah Kab. Bondowoso
11	Pemerintah Kab. Situbondo
12	Pemerintah Kab. Banyuwangi
13	Pemerintah Kab. Jember
14	Pemerintah Kab. Malang
15	Pemerintah Kab. Pasuruan
16	Pemerintah Kab. Probolinggo
17	Pemerintah Kab. Lumajang
18	Pemerintah Kab. Kediri
19	Pemerintah Kab. Tulungagung
20	Pemerintah Kab. Nganjuk
21	Pemerintah Kab. Trenggalek
22	Pemerintah Kab. Blitar
23	Pemerintah Kab. Madiun
24	Pemerintah Kab. Ngawi
25	Pemerintah Kab. Magetan

<b>NO</b>	<b>NAMA INSTANSI</b>
26	Pemerintah Kab. Ponorogo
27	Pemerintah Kab. Pacitan
28	Pemerintah Kab. Bojonegoro
29	Pemerintah Kab. Tuban
30	Pemerintah Kab. Lamongan
31	Pemerintah Kota Surabaya
32	Pemerintah Kota Mojokerto
33	Pemerintah Kota Malang
34	Pemerintah Kota Pasuruan
35	Pemerintah Kota Probolinggo
36	Pemerintah Kota Blitar
37	Pemerintah Kota Kediri
38	Pemerintah Kota Madiun
39	Pemerintah Kota Batu
<b>WILAYAH KERJA KANREG III BKN BANDUNG</b>	
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2	Pemerintah Kab. Bogor
3	Pemerintah Kab. Sukabumi
4	Pemerintah Kab. Cianjur
5	Pemerintah Kab. Bekasi
6	Pemerintah Kab. Karawang
7	Pemerintah Kab. Purwakarta
8	Pemerintah Kab. Subang
9	Pemerintah Kab. Bandung
10	Pemerintah Kab. Sumedang
11	Pemerintah Kab. Garut
12	Pemerintah Kab. Tasikmalaya
13	Pemerintah Kab. Ciamis
14	Pemerintah Kab. Cirebon
15	Pemerintah Kab. Kuningan
16	Pemerintah Kab. Indramayu
17	Pemerintah Kab. Majalengka
18	Pemerintah Kab. Bandung Barat
19	Pemerintah Kab. Pangandaran
20	Pemerintah Kota Bandung
21	Pemerintah Kota Bogor
22	Pemerintah Kota Sukabumi
23	Pemerintah Kota Cirebon
24	Pemerintah Kota Bekasi

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BSre





NO	NAMA INSTANSI
25	Pemerintah Kota Depok
26	Pemerintah Kota Cimahi
27	Pemerintah Kota Tasikmalaya
28	Pemerintah Kota Banjar
29	Pemerintah Provinsi Banten
30	Pemerintah Kab. Serang
31	Pemerintah Kab. Pandeglang
32	Pemerintah Kab. Lebak
33	Pemerintah Kab. Tangerang
34	Pemerintah Kota Tangerang
35	Pemerintah Kota Cilegon
36	Pemerintah Kota Serang
37	Pemerintah Kota Tangerang Selatan
WILAYAH KERJA KANREG IV BKN MAKASSAR	
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
2	Pemerintah Kab. Poso
3	Pemerintah Kab. Donggala
4	Pemerintah Kab. Tolitoli
5	Pemerintah Kab. Banggai
6	Pemerintah Kab. Buol
7	Pemerintah Kab. Morowali
8	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
9	Pemerintah Kab. Parigi Moutong
10	Pemerintah Kab. Tojo Una Una
11	Pemerintah Kab. Sigi
12	Pemerintah Kab. Banggai Laut
13	Pemerintah Kab. Morowali Utara
14	Pemerintah Kota Palu
15	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
16	Pemerintah Kab. Pinrang
17	Pemerintah Kab. Gowa
18	Pemerintah Kab. Wajo
19	Pemerintah Kab. Bone
20	Pemerintah Kab. Tana Toraja
21	Pemerintah Kab. Maros
22	Pemerintah Kab. Luwu
23	Pemerintah Kab. Sinjai
24	Pemerintah Kab. Bulukumba
25	Pemerintah Kab. Bantaeng

NO	NAMA INSTANSI
26	Pemerintah Kab. Jeneponto
27	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
28	Pemerintah Kab. Takalar
29	Pemerintah Kab. Barru
30	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang
31	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
32	Pemerintah Kab. Soppeng
33	Pemerintah Kab. Enrekang
34	Pemerintah Kab. Luwu Utara
35	Pemerintah Kab. Luwu Timur
36	Pemerintah Kab. Toraja Utara
37	Pemerintah Kota Makassar
38	Pemerintah Kota Parepare
39	Pemerintah Kota Palopo
40	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
41	Pemerintah Kab. Konawe
42	Pemerintah Kab. Buton
43	Pemerintah Kab. Muna
44	Pemerintah Kab. Kolaka
45	Pemerintah Kab. Konawe Selatan
46	Pemerintah Kab. Kolaka Utara
47	Pemerintah Kab. Bombana
48	Pemerintah Kab. Wakatobi
49	Pemerintah Kab. Buton Utara
50	Pemerintah Kab. Konawe Utara
51	Pemerintah Kab. Kolaka Timur
52	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
53	Pemerintah Kab. Buton Selatan
54	Pemerintah Kab. Buton Tengah
55	Pemerintah Kab. Muna Barat
56	Pemerintah Kab. Muna Barat
57	Pemerintah Kota Kendari
58	Pemerintah Kota Baubau
59	Pemerintah Provinsi Maluku
60	Pemerintah Kab. Maluku Tengah
61	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
62	Pemerintah Kab. Buru
63	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat
64	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru

<b>NO</b>	<b>NAMA INSTANSI</b>
65	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
66	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
67	Pemerintah Kab. Buru Selatan
68	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
69	Pemerintah Kota Ambon
70	Pemerintah Kota Tual
71	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
72	Pemerintah Kab. Mamuju Utara
73	Pemerintah Kab. Mamuju
74	Pemerintah Kab. Mamasa
75	Pemerintah Kab. Polewali Mandar
76	Pemerintah Kab. Majene
77	Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
<b>WILAYAH KERJA KANREG V BKN JAKARTA</b>	
1	Pemerintah Provinsi Lampung
2	Pemerintah Kab. Lampung Selatan
3	Pemerintah Kab. Lampung Tengah
4	Pemerintah Kab. Lampung Utara
5	Pemerintah Kab. Lampung Barat
6	Pemerintah Kab. Tulang Bawang
7	Pemerintah Kab. Tanggamus
8	Pemerintah Kab. Way Kanan
9	Pemerintah Kab. Lampung Timur
10	Pemerintah Kab. Pesawaran
11	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
12	Pemerintah Kab. Pringsewu
13	Pemerintah Kab. Mesuji
14	Pemerintah Kab. Pesisir Barat
15	Pemerintah Kota Metro
16	Pemerintah Kota Bandar Lampung
17	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
18	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
19	Pemerintah Kab. Sambas
20	Pemerintah Kab. Sanggau
21	Pemerintah Kab. Sintang
22	Pemerintah Kab. Mempawah
23	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
24	Pemerintah Kab. Ketapang

<b>NO</b>	<b>NAMA INSTANSI</b>
25	Pemerintah Kab. Bengkayang
26	Pemerintah Kab. Landak
27	Pemerintah Kab. Melawi
28	Pemerintah Kab. Sekadau
29	Pemerintah Kab. Kubu Raya
30	Pemerintah Kab. Kayong Utara
31	Pemerintah Kota Pontianak
32	Pemerintah Kota Singkawang
<b>WILAYAH KERJA KANREG VI BKN MEDAN</b>	
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2	Pemerintah Kab. Deli Serdang
3	Pemerintah Kab. Karo
4	Pemerintah Kab. Langkat
5	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah
6	Pemerintah Kab. Simalungun
7	Pemerintah Kab. Labuhanbatu
8	Pemerintah Kab. Dairi
9	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
10	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan
11	Pemerintah Kab. Asahan
12	Pemerintah Kab. Nias
13	Pemerintah Kab. Toba Samosir
14	Pemerintah Kab. Mandailing Natal
15	Pemerintah Kab. Nias Selatan
16	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
17	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
18	Pemerintah Kab. Samosir
19	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
20	Pemerintah Kab. Padang Lawas
21	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
22	Pemerintah Kab. Batubara
23	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
24	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
25	Pemerintah Kab. Nias Barat
26	Pemerintah Kab. Nias Utara
27	Pemerintah Kota Medan
28	Pemerintah Kota Tebing Tinggi
29	Pemerintah Kota Binjai
30	Pemerintah Kota Pematang Siantar

NO	NAMA INSTANSI
31	Pemerintah Kota Tanjung Balai
32	Pemerintah Kota Sibolga
33	Pemerintah Kota Padangsidempuan
34	Pemerintah Kota Gunung Sitoli
WILAYAH KERJA KANREG VII BKN PALEMBANG	
1	Pemerintah Provinsi Jambi
2	Pemerintah Kab. Batang Hari
3	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
4	Pemerintah Kab. Bungo
5	Pemerintah Kab. Merangin
6	Pemerintah Kab. Kerinci
7	Pemerintah Kab. Sarolangun
8	Pemerintah Kab. Tebo
9	Pemerintah Kab. Muaro Jambi
10	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur
11	Pemerintah Kota Jambi
12	Pemerintah Kota Sungai Penuh
13	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
14	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
15	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
16	Pemerintah Kab. Muara Enim
17	Pemerintah Kab. Lahat
18	Pemerintah Kab. Musi Rawas
19	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
20	Pemerintah Kab. Banyuasin
21	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
22	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.
23	Pemerintah Kab. Ogan Ilir
24	Pemerintah Kab. Empat Lawang
25	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
26	Pemerintah Kota Palembang
27	Pemerintah Kota Pagar Alam
28	Pemerintah Kota Lubuk Linggau
29	Pemerintah Kota Prabumulih
30	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
31	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
32	Pemerintah Kab. Bangka
33	Pemerintah Kab. Belitung
34	Pemerintah Kab. Bangka Barat

<b>NO</b>	<b>NAMA INSTANSI</b>
35	Pemerintah Kab. Bangka Tengah
36	Pemerintah Kab. Bangka Selatan
37	Pemerintah Kab. Belitung Timur
38	Pemerintah Kota Pangkal Pinang
39	Pemerintah Provinsi Bengkulu
40	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
41	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
42	Pemerintah Kab. Rejang Lebong
43	Pemerintah Kab. Kaur
44	Pemerintah Kab. Seluma
45	Pemerintah Kab. Mukomuko
46	Pemerintah Kab. Kepahiang
47	Pemerintah Kab. Lebong
48	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
49	Pemerintah Kota Bengkulu
<b>WILAYAH KERJA KANREG VIII BKN BANJARMASIN</b>	
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
2	Pemerintah Kab. Kapuas
3	Pemerintah Kab. Barito Utara
4	Pemerintah Kab. Barito Selatan
5	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
6	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
7	Pemerintah Kab. Pulang Pisau
8	Pemerintah Kab. Gunung Mas
9	Pemerintah Kab. Lamandau
10	Pemerintah Kab. Sukamara
11	Pemerintah Kab. Murung Raya
12	Pemerintah Kab. Katingan
13	Pemerintah Kab. Seruyan
14	Pemerintah Kab. Barito Timur
15	Pemerintah Kota Palangka Raya
16	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
17	Pemerintah Kab. Banjar
18	Pemerintah Kab. Tanah Laut
19	Pemerintah Kab. Tapin
20	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
21	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
22	Pemerintah Kab. Barito Kuala
23	Pemerintah Kab. Tabalong

<b>NO</b>	<b>NAMA INSTANSI</b>
24	Pemerintah Kab. Kotabaru
25	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
26	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
27	Pemerintah Kab. Balangan
28	Pemerintah Kota Banjarmasin
29	Pemerintah Kota Banjarbaru
30	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
31	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
32	Pemerintah Kab. Paser
33	Pemerintah Kab. Berau
34	Pemerintah Kab. Kutai Barat
35	Pemerintah Kab. Kutai Timur
36	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
37	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu
38	Pemerintah Kota Samarinda
39	Pemerintah Kota Balikpapan
40	Pemerintah Kota Bontang
41	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
42	Pemerintah Kab. Bulungan
43	Pemerintah Kab. Malinau
44	Pemerintah Kab. Nunukan
45	Pemerintah Kab. Tana Tidung
46	Pemerintah Kota Tarakan
<b>WILAYAH KERJA KANREG IX BKN JAYAPURA</b>	
1	Pemerintah Provinsi Papua
2	Pemerintah Kab. Jayapura
3	Pemerintah Kab. Biak Numfor
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen
5	Pemerintah Kab. Merauke
6	Pemerintah Kab. Jayawijaya
7	Pemerintah Kab. Nabire
8	Pemerintah Kab. Puncak Jaya
9	Pemerintah Kab. Paniai
10	Pemerintah Kab. Mimika
11	Pemerintah Kab. Boven Digoel
12	Pemerintah Kab. Mappi
13	Pemerintah Kab. Asmat
14	Pemerintah Kab. Yahukimo
15	Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang

NO	NAMA INSTANSI
16	Pemerintah Kab. Tolikara
17	Pemerintah Kab. Sarmi
18	Pemerintah Kab. Keerom
19	Pemerintah Kab. Waropen
20	Pemerintah Kab. Supiori
21	Pemerintah Kab. Mamberamo Raya
22	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
23	Pemerintah Kab. Lanny Jaya
24	Pemerintah Kab. Yalimo
25	Pemerintah Kab. Nduga
26	Pemerintah Kab. Dogiyai
27	Pemerintah Kab. Puncak
28	Pemerintah Kab. Deiyai
29	Pemerintah Kab. Intan Jaya
30	Pemerintah Kota Jayapura
WILAYAH KERJA KANREG X BKN DENPASAR	
1	Pemerintah Provinsi Bali
2	Pemerintah Kab. Buleleng
3	Pemerintah Kab. Jembrana
4	Pemerintah Kab. Klungkung
5	Pemerintah Kab. Gianyar
6	Pemerintah Kab. Karangasem
7	Pemerintah Kab. Bangli
8	Pemerintah Kab. Badung
9	Pemerintah Kab. Tabanan
10	Pemerintah Kota Denpasar
11	Pemerintah Provinsi NTB
12	Pemerintah Kab. Lombok Barat
13	Pemerintah Kab. Lombok Tengah
14	Pemerintah Kab. Lombok Timur
15	Pemerintah Kab. Bima
16	Pemerintah Kab. Sumbawa
17	Pemerintah Kab. Dompu
18	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
19	Pemerintah Kab. Lombok Utara
20	Pemerintah Kota Mataram
21	Pemerintah Kota Bima
22	Pemerintah Provinsi NTT
23	Pemerintah Kab. Kupang



<b>NO</b>	<b>NAMA INSTANSI</b>
24	Pemerintah Kab. Belu
25	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
26	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
27	Pemerintah Kab. Alor
28	Pemerintah Kab. Sikka
29	Pemerintah Kab. Flores Timur
30	Pemerintah Kab. Ende
31	Pemerintah Kab. Ngada
32	Pemerintah Kab. Manggarai
33	Pemerintah Kab. Sumba Timur
34	Pemerintah Kab. Sumba Barat
35	Pemerintah Kab. Lembata
36	Pemerintah Kab. Rote Ndao
37	Pemerintah Kab. Manggarai Barat
38	Pemerintah Kab. Manggarai Timur
39	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
40	Pemerintah Kab. Nagekeo
41	Pemerintah Kab. Sumba Tengah
42	Pemerintah Kab. Sabu Raijua
43	Pemerintah Kab. Malaka
44	Pemerintah Kota Kupang
<b>WILAYAH KERJA KANREG XI BKN MANADO</b>	
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
2	Pemerintah Kab. Minahasa
3	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
5	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
6	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
7	Pemerintah Kab. Minahasa Utara
8	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
9	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro
10	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
11	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
12	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
13	Pemerintah Kota Manado
14	Pemerintah Kota Bitung
15	Pemerintah Kota Tomohon
16	Pemerintah Kota KotaMobagu
17	Pemerintah Provinsi Gorontalo

<b>NO</b>	<b>NAMA INSTANSI</b>
18	Pemerintah Kab. Gorontalo
19	Pemerintah Kab. Boalemo
20	Pemerintah Kab. Pohuwato
21	Pemerintah Kab. Bone Bolango
22	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
23	Pemerintah Kota Gorontalo
24	Pemerintah Provinsi Maluku Utara
25	Pemerintah Kab. Halmahera Barat
26	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
27	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
28	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
29	Pemerintah Kab. Halmahera Utara
30	Pemerintah Kab. Halmahera Timur
31	Pemerintah Kab. Pulau Morotai
32	Pemerintah Kab. Pulau Taliabu
33	Pemerintah Kota Ternate
34	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
<b>WILAYAH KERJA KANREG XII BKN PEKANBARU</b>	
1	Pemerintah Provinsi Riau
2	Pemerintah Kab. Kampar
3	Pemerintah Kab. Bengkalis
4	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
5	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
6	Pemerintah Kab. Pelalawan
7	Pemerintah Kab. Rokan Hulu
8	Pemerintah Kab. Rokan Hilir
9	Pemerintah Kab. Siak
10	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
11	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
12	Pemerintah Kota Pekanbaru
13	Pemerintah Kota Dumai
14	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
15	Pemerintah Kab. Agam
16	Pemerintah Kab. Pasaman
17	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
18	Pemerintah Kab. Solok
19	Pemerintah Kab. Padang Pariaman
20	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
21	Pemerintah Kab. Tanah Datar

<b>NO</b>	<b>NAMA INSTANSI</b>
22	Pemerintah Kab. Sijunjung
23	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
24	Pemerintah Kab. Solok Selatan
25	Pemerintah Kab. Dharmasraya
26	Pemerintah Kab. Pasaman Barat
27	Pemerintah Kota Bukittinggi
28	Pemerintah Kota Padang Panjang
29	Pemerintah Kota Sawahlunto
30	Pemerintah Kota Solok
31	Pemerintah Kota Padang
32	Pemerintah Kota Payakumbuh
33	Pemerintah Kota Pariaman
34	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
35	Pemerintah Kab. Bintan
36	Pemerintah Kab. Karimun
37	Pemerintah Kab. Natuna
38	Pemerintah Kab. Lingga
39	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
40	Pemerintah Kota Batam
41	Pemerintah Kota Tanjungpinang
<b>WILAYAH KERJA KANREG XIII BKN ACEH</b>	
1	Pemerintah Aceh
2	Pemerintah Kab. Aceh Besar
3	Pemerintah Kab. Pidie
4	Pemerintah Kab. Aceh Utara
5	Pemerintah Kab. Aceh Timur
6	Pemerintah Kab. Aceh Selatan
7	Pemerintah Kab. Aceh Barat
8	Pemerintah Kab. Aceh Tengah
9	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara
10	Pemerintah Kab. Simeulue
11	Pemerintah Kab. Bireuen
12	Pemerintah Kab. Aceh Singkil
13	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya
14	Pemerintah Kab. Gayo Lues
15	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang
16	Pemerintah Kab. Nagan Raya
17	Pemerintah Kab. Aceh Jaya
18	Pemerintah Kab. Bener Meriah

<b>NO</b>	<b>NAMA INSTANSI</b>
19	Pemerintah Kab. Pidie Jaya
20	Pemerintah Kota Sabang
21	Pemerintah Kota Banda Aceh
22	Pemerintah Kota Langsa
23	Pemerintah Kota Lhokseumawe
24	Pemerintah Kota Subulussalam
<b>WILAYAH KERJA KANREG XIV BKN MANOKWARI</b>	
1	Pemerintah Provinsi Papua Barat
2	Pemerintah Kab. Sorong
3	Pemerintah Kab. Sorong Selatan
4	Pemerintah Kab. Raja Ampat
5	Pemerintah Kab. Manokwari
6	Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
7	Pemerintah Kab. Teluk Wondama
8	Pemerintah Kab. Fak-Fak
9	Pemerintah Kab. Kaimana
10	Pemerintah Kab. Tambrau
11	Pemerintah Kab. Maybrat
12	Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
13	Pemerintah Kab. Manokwari Selatan
14	Pemerintah Kota Sorong

Lampiran II Surat Kepala Pusbangpeg ASN BKN  
Nomor : 431/Pnwr.A/TU/Pusbangpeg ASN/VII/2023  
Tanggal : 7 Juli 2023

**JADWAL RANGKAIAN SELEKSI BEASISWA DAN  
ORIENTASI MAHASISWA PIK BKN ANGKATAN XVII  
TAHUN 2023\***

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>TANGGAL</b>
1.	Pendaftaran beasiswa	10 Juli – 16 September 2023
2.	Pengumuman peserta daftar lolos seleksi administrasi	2 Oktober 2023
3.	Seleksi ujian berbasis komputer dan wawancara	16 – 20 Oktober 2023
4.	Pengumuman lulus seleksi beasiswa	13 November 2023
5.	Pemberkasan	14 November – 29 Desember 2023
6.	Registrasi perkuliahan	8 Januari 2024
7.	Orientasi mahasiswa baru	4 Maret 2024
8.	Perkuliahan mahasiswa PIK Angkatan XVII	25 Maret 2024

\*Perubahan jadwal akan diinformasikan melalui website <https://pusbangasn.bkn.go.id/>

1. Format Surat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian

*KOP Surat Instansi*

**SURAT PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN/  
PEJABAT YANG BERWENANG**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat, Golongan :

Jabatan :

Instansi :

selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dari:

Nama :

NIP :

Pangkat, Golongan :

Jabatan :

Instansi :

*(untuk pengajuan secara kolektif, pengusulan dapat diubah ke dalam format tabel sebagai berikut)*

No	Nama	NIP	Pangkat, Golongan	Jabatan	Instansi

menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Beasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (PIK BKN) dan menyetujui yang bersangkutan untuk mengikuti tugas belajar jika dinyatakan lulus seleksi beasiswa PIK BKN.

.....2023

Meterai  
Rp10.000

(ttd)  
(Nama)

NIP.

## 2. Format Surat Pernyataan Kesiediaan Pimpinan Unit Kerja

*KOP Surat Instansi*

---

### **SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PIMPINAN UNIT KERJA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat, Golongan :

Jabatan :

Instansi :

menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa pegawai yang kami usulkan merupakan para pegawai yang potensial untuk dikembangkan pada bidang pengelolaan kepegawaian.

Adapun pegawai yang kami usulkan dinyatakan diterima sebagai karyasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (PIK BKN), maka setelah menyelesaikan masa pendidikan, pegawai dimaksud selanjutnya akan kami tempatkan pada bidang pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan kepegawaian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa tekanan pihak manapun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....2023

*Meterai  
Rp10.000*

*(ttd)  
(Nama)*

NIP.

### 3. Format Surat Pernyataan Calon Mahasiswa

#### **SURAT PERNYATAAN CALON MAHASISWA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat (sesuai KTP) :

Instansi :

No. *Handphone* :

Nama Atasan Langsung :

Jabatan Atasan Langsung :

No. *Handphone* Atasan Langsung :

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti tugas belajar pada Pendidikan Ilmu Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (PIK BKN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIK BKN dan sanggup mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan BKN apabila:

1. mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi;
2. mengundurkan diri selama masa perkuliahan;
3. tidak dapat menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan waktu yang ditentukan; atau
4. tidak memenuhi standar kelulusan akademis dalam evaluasi per semester yang dilakukan oleh PIK BKN.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai syarat pengajuan Beasiswa PIK BKN untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....2023

*Meterai*  
*Rp10.000*

*(tt)*  
(Nama)

NIP.



